

## PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012–2018

Ika Fitriyani<sup>1</sup>, Ismawati<sup>2</sup>, Nurul Wahida<sup>3</sup>, Asmini<sup>4</sup>

1. Keuangan Perbankan, Universitas Samawa
2. Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa
3. Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa
4. Manajemen, Universitas Samawa

Email :

[ikafitriyani@universitas-samawa.ac.id](mailto:ikafitriyani@universitas-samawa.ac.id),  
[ismawati@universitas-samawa.ac.id](mailto:ismawati@universitas-samawa.ac.id)

---

### ABSTRACT

*This study aims to know how the influence of regional spending toward economic growth in Sumbawa district during the period of 2012-2018. This study was an associative study with a quantitative approach. The type of data used in this study was secondary data collected through the documentation method. The data collected were analyzed using simple linear regression analysis techniques, t test and the coefficient of determination ( $R^2$ ). Based on the results of study, obtained a simple linear regression equation, namely  $Y = 55.194 - 4.058 \text{ Ln}X + e$ , the constant value was 55.194. This constant value states that if the independent variable (regional spending) was equal to zero, then the economic growth in Sumbawa Regency will be 55.194 percent. Furthermore, the coefficient of determination was 0.255 percent. This showed that the realization of regional spending contributed 25.5 percent toward economic growth, while the remaining of 74.5 percent was influenced by variables outside the regression model of this study. Based on the results of research using the t test shows that the results obtained from regional spending with a t-value of -1.308 were lower than the t-table of 2.571, which means that there was no significant or no significant (negative) relationship between regional spending on economic growth in Sumbawa district.*

**Keywords:** Regional Spending, Economic Growth.

---

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Kabupaten di wilayah pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung Barat Pulau Sumbawa. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa dihitung

berdasarkan perubahan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sumbawa.

Dari data publikasi BPS menyatakan bahwa selama periode tahun 2012 hingga tahun 2018 Kabupaten Sumbawa memiliki PDRB harga konstan yang bersifat fluktuatif dengan pertumbuhan 6,67 sampai dengan 4,18 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan dengan pertumbuhan mencapai 5,42 persen pada 6 tahun 2016 dan 4,18 persen pada tahun 2018. Tetapi dari tahun 2016 ke tahun 2017 PDRB Kabupaten Sumbawa sempat stabil atau meningkat. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan yaitu dari 8.97 triliun rupiah pada Tahun 2016 menjadi 9.58 triliun rupiah pada Tahun 2017. Hal ini menunjukkan selama Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6,86 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian PDRB juga mengalami kenaikan dari 9,58 trilyun Rupiah pada Tahun 2017 menjadi 9,97 trilyun rupiah pada Tahun 2018. Hal ini menunjukkan selama Tahun 2018 Kabupaten Sumbawa mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,18 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha atau meningkatnya volume konsumsi jika ditinjau dari pendekatan pengeluaran, tidak dipengaruhi oleh inflasi.

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya untuk mensejahterakan masyarakat didaerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah keinginan masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi seperti: sumber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian tenaga kerja dan skala produksi. Faktor nonekonomi seperti: 10 sosial, manusia, politik dan administratif.

Pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu priode biasanya satu tahun. Belanja daerah atau pengeluaran pemerintah daerah berkaitan erat dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) karena secara langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang produktif, maka semakin memperbesar tingkat perekonomian disuatu daerah. Belanja Daerah sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan perekonomian suatu negara. Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah belum tentu berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, perlu dilihat efisiensi penggunaan pengeluaran pemerintah tersebut (Berutu dalam Larengkum, 2013). Dari data publikasi BPS

menunjukkan bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Belanja Daerah terus meningkat dan mengalami penurunan pada tahun 2018, sementara PDRB mengalami penurunan atau perlambatan pada tahun 2016 dan tahun 2018 daripada tahun sebelumnya. Seperti pada tahun 2016 PDRB Kabupaten Sumbawa menjadi 5,42 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya sekitar 6,42 persen, dan pada tahun 2018 PDRB Kabupaten Sumbawa menjadi 4,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 6,86 persen terjadi penurunan di karenakan terjadinya penurunan laju pertumbuhan pada beberapa sektor salah satunya sektor pertanian sektor yang sangat berperan akan dampak nominal PDRB. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2018.”

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengeluaran/Belanja Daerah**

Keynes berpendapat tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat. Pada umumnya pengeluaran agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat full employment. Keadaan ini disebabkan karena investasi yang dilakukan para pengusaha biasanya lebih redah dari tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian full employment. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan full employment. Berdasarkan permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 22 ayat 1 huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penggunaannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersana antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 19 merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut : 1. Organisasi yaitu suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD, kepala daerah dan wakil daerah, sekretariat daerah, sertadinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. 2. Fungsi, misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. 3. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi. 4. Jenis belanja yaitu seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal /pembangunan.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain, perekonomian mengalami

perkembangan jika terjadi pertumbuhan output riil. Sedangkan menurut Sukirno (2004, h.9) Pertumbuhan Ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah ekonomi makro ekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitas. Selanjutnya Menurut Nanga (2005, h.273) pertumbuhan ekonomi adalah sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Kemudian menurut Sukirno (2006, h.29) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan riil semakin berkembang persentasinya kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan riil pada tahun sebelumnya. Berikut ini beberapa teori pertumbuhan ekonomi yaitu : 1. Teori Pertumbuhan Klasik Menurut Adam Smith sebagai ahli ekonomi klasik, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Kemudian menurut David Ricardo, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses tarik menarik antara dua kekuatan yaitu “the law of diminishing return” dan kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Mill, bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan, dan berfikir tradisional.

Teori pertumbuhan Neo-Klasik Pada pertengahan tahun 1950-1n berkembang teori pertumbuhan neo-klasik yang merupakan suatu analisis pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Perintisnya adalah Solow, kemudian diikuti dan dikembangkan oleh Edmund Philips, Harry Johson, dan J.E Meade. Pendapat-pendapat para ahli tersebut, yaitu (Suryana, 2000:58): a. Adanya akumulasi kapital yang merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi. b. Perkembangan merupakan proses yang gradual. c. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. d. Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan. e. Aspek internasional yang merupakan faktor bagi perkembangan. Selanjutnya dalam Sadono (2004:437), menurut Solow yang menjadi faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya penambahan modal dan tenaga kerja. Namun faktor yang terpenting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern, Teori Pertumbuhan Rostow Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan ekonominya. Dan dalam bukunya “The Stages Of Economic” (1960), Rostow mengemukakan tahap-tahap dalam proses pembangunan ekonomi yang dialami oleh setiap negara pada umumnya ke dalam 5 tahap, yaitu (Lincoln, 2004:48): 1) The traditional society (masyarakat tradisional) 2) Persyaratan

tinggal landas 3) Tinggal landas 4) Menuju kematangan 5) Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi. b. Teori Pertumbuhan Modern menurut Kuznet Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh berdasarkan kemajuan teknologi, institusional, dan ideologis yang diperlukannya.

### **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 2009). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses pembangunan. PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2005:56), sedangkan menurut BPS Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Untuk lebih jelas dalam menghitung angka-angka produk domestik regional bruto ada tiga pendekatan yang cukup kerap digunakan dalam melakukan suatu penelitian.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2018. 3.2

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan

(Sugiyono, 2015). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2018. Sumber data yang digunakan adalah data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku, literatur, catatan-catatan atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Hasan, 2002:58). Adapun data yang diambil 50 bersumber dari BPS dan BPKAD adalah data seluruh Kabupaten Sumbawa. Tahun yang dipilih adalah tahun 2012-2018 hal ini dikarenakan data time series adalah sebanyak 7 Tahun sedangkan data antar ruang (cross section) diambil dari Kabupaten Sumbawa.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dokumentasi Menurut Sugiyono (2011) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun tujuan dokumentasi adalah untuk memperoleh sudut pandang orisinal dari kejadian situasi nyata. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa profil atau gambaran pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2018.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis Regresi Linier Sederhana Menurut Supranto (2004, h.177) analisis regresi linier sederhana ini hanya mengandalkan satu variabel bebas dan variabel terikat yaitu dengan rumus:

$$Y = a + bX + e$$

Dimana :

- Y = Pertumbuhan ekonomi (Variabel terikat)
- X = Realisasi belanja daerah (Variabel bebas)
- a = Nilai konstanta
- b = Koefisien regresi
- e = Intercept

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengaruh Variabel Independen Belanja Daerah terhadap Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi Untuk melihat apakah ada Pengaruh Linier Variabel Independen Belanja Daerah terhadap Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi. Dapat dilihat pada tabel 4.7 Coefficients Dengan Analisis Hipotesis : Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Variabel Independen Belanja Daerah terhadap Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi. Ha : Ada Pengaruh yang signifikan antara Variabel Independen Belanja Daerah terhadap Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi. Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom  $DF = n - k$  atau  $DF = 7 - 2 = 5$ . Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 2,571 (untuk uji dua arah). Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana t hitung adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Belanja Daerah terhadap Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi ialah - 1,308.

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut : Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_a$  diterima Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, dan  $H_a$  ditolak Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut : Jika Signifikan  $< 0,05$  maka berpengaruh signifikan Jika Signifikan  $> 0,05$  maka tidak ada pengaruh signifikan Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukan angka  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,308 < t_{tabel}$  sebesar  $2,571$ . Dengan demikian keputusannya ialah  $H_0$  diterima, dan  $H_a$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara Variabel Independen Belanja Daerah terhadap Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi.

Maka Variabel Independen Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi. Besarnya Koefisien Beta pada tabel 4.7 di atas (dalam kolom Standardized Coefficient Beta) sebesar  $-0,505$  atau jika dibuat persen menjadi sebesar  $50,5\%$  menunjukan bahwa pengaruh sebesar ini tidak mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada Belanja Daerah, terlebih karena nilai signifikansi/probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig  $0,248 > 0,05$ . Kemampuan Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan penelitian ini menunjukan bahwa efek atau pengaruhnya masih amat kecil diakibatkan oleh belanja daerah yang dilihat dari besarnya pengeluaran terhadap belanja tidak langsung yaitu salah satunya pada belanja pegawai dan belanja langsung yaitu salah satunya pada belanja modal di Kabupaten Sumbawa, sehingga terkesan memberikan pengaruh yang tidak signifikan. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukan bahwa belanja daerah mempunyai pengaruh namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Sumbawa terutama dalam aspek pengeluaran/belanja pemerintah daerah belum mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Devarajan (1996) menemukan hubungan negative dan tidak signifikan hubungan antara pengeluaran produktif dengan pertumbuhan ekonomi. Josaphat P Kweka dan Oliver Morrissey (1999) dalam Alfirman meneliti hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berdampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak negative disebabkan karena tidak efisiennya pengeluaran pemerintah di Tanzania. Hal ini dikarenakan meski pengalokasian dana belanja dari pemerintah terus naik dan bertambah setiap tahunnya tidak berjalan beriringan dengan  $69$  pertumbuhan ekonomi yang terjadi, bahkan pertumbuhan ekonomi seakan tidak berpengaruh dengan dengan perubahan alokasi anggaran dari belanja yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam konsep ekonomi makro pengeluaran pemerintah akan meningkatkan perekonomian. Pengeluaran pemerintah yang mendorong perekonomian ini tentunya dengan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang lebih produktif atau yang memberikan dorongan bagi perkembangan kegiatan ekonomi. Pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan

bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan dapat menstimulus perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan. Seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Namun pada kenyataannya, pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa lebih banyak digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak produktif dan mengarah kepada tujuan konsumtif. Misalnya seperti belanja pegawai. Dimana belanja pegawai ini merupakan belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Belanja pegawai disatu sisi memang memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana kompensasi atau gaji pegawai pemerintah tersebut merupakan faktor pendapatan yang akan digunakan untuk kegiatan konsumsi membeli barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai tersebut. Seiring dengan kenaikan gaji atau kompensasi pegawai maka terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen serta penyedia barang dan jasa untuk menghasilkan dan menyediakan barang/jasa sesuai keinginan konsumen. Sehingga akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun disisi lain belanja pegawai juga dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan besarnya belanja pegawai akan mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian membebani stabilitas keuangan daerah. Sama halnya dengan keadaan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, dimana belanja pegawai di Kabupaten Sumbawa yang digunakan untuk membiayai gaji dan honorarium pegawai negeri di daerah memang dapat meningkatkan penerimaan pegawai negeri di Kabupaten Sumbawa, tetapi gaji dan honorarium tersebut juga merupakan faktor pendapatan yang akan digunakan untuk kegiatan konsumsi membeli barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai tersebut, sehingga akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa dan akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB kabupaten Sumbawa sebesar 74,5% dibentuk oleh variabel lain diluar model regresi penelitian ini. Berdasarkan data yang diperoleh, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sumbawa pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan sharenya sebesar 39,15 persen. Sektor Kontruksi dilihat dari urusan Pemerintahan pelaksanaan pekerjaan kontruksi yang dapat di sajikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terjadi peningkatan belanja dikarenakan kegiatan proyek fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sedang gencar menggenjot proyek infrastuktur khususnya untuk gedung dan bangunan. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan terjadinya penurunan pada proyek jalan, irigasi, dan jaringan sendiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mempunyai peran penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan



menguntungkan dan bermanfaat bagi daerah pada sektor lainnya. Namun dalam penelitian ini pengaruh belanja daerah tidak signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan masih ada anggaran belanja untuk membiayai kegiatan yang tidak produktif. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai sebuah organisasi, diharapkan dapat mengalokasikan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan tujuan untuk menggerakkan dan merangsang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil pengujian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu di Kabupaten Sumbawa dapat disimpulkan bahwa jika berdasarkan hasil Uji t menunjukkan t-hitung variabel Belanja daerah sebesar -1,308 lebih kecil t-tabel sebesar 2,571 ( $-1,308 < 2,571$ ) yang artinya bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak berpengaruh nyata (negatif) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Sumbawa terutama dalam aspek pengeluaran/belanja pemerintah daerah belum mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa.

### **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil analisis data, adapun beberapa rekomendasi untuk pihak-pihak terkait yang dapat disampaikan antara lain:

Kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar dapat lebih meningkatkan perkembangan setiap sektor perekonomian, baik sektor pertanian, perdagangan hotel dan restoran, industri pengolahan, listrik dan air minum, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan maupun jasa-jasa lainnya. Sehingga dengan meningkatnya setiap sektor ekonomi di Kabupaten Sumbawa maka akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya pemerintah harus lebih jeli dalam meningkatkan tingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya belanja daerah di Kabupaten Sumbawa, diharapkan agar dapat mendongkrak tingkat pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya dengan menekankan atau meningkatkan belanja infrastruktur untuk mendukung sektor pariwisata. Dimana belanja infrastruktur ini adalah belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan dapat menstimulus perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan

**DAFTAR RUJUKAN**

- Anonim. 2019. Sumbawa Dalam Angka 2018. BPS Sumbawa, Sumbawa Besar.
- Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. STIM YKPN Yogyakarta.
- BPS. 2020. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumbawa 2015-2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks Kelompok Gramedia Anggota IKAPI, Jakarta.
- Deviani. (2016). *Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (studi empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat*. Skripsi. Sumatera Barat: Universitas Negeri Padang.
- Dornbusch, Rudiger. 2001. *Makro Ekonomi*. PT. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Haryoko, Septo dan Iskandar 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Hasyim, Ali Ibrahim. (2016). *Ekonomi Makro*. Kencana, Jakarta. Krisra, Jeval. (2014). *Pengaruh Realisasi Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Nagan Raya*. Skripsi. Aceh Barat: Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh.
- Lantu, Yeni Saarce Magdalena dkk. (2017). *Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kota Bitung*. Skripsi. Sulawesi Utara: Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Makrifah. (2009). *Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan IPM)*.
- Mardiasno. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Nanga,
- Putra, Norista Gathama. (2011). *Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Jawa Tengah: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

- Rusmini. (2015). Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2013. Skripsi. Sumbawa Besar: Universitas Samawa (UNSA).
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarwoko. 2005. Dasar-Dasar Ekonometrika. Yogyakarta: Andi.
- Simanjuntak, Payaman. 2006. Pengantar Ilmu ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: LPFE UI.
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2007. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan, hal 54-56. Jakarta: INDEF.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2004. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sukirno, Sadono. 2006. Makro Ekonomi Teori Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supranto, J. 2004. Statistik. Edisi Keenan. Erlangga. Jakarta. Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan. PT. Salemba Emban Patria, Jakarta.
- Sodik, Jamzani. (2007). "Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 12 (1): 27-36 Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Taher, Salbia., dan Antje Tuasela. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika
- Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zaris, Roeslan. 2009. Perspektif Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: LPFE UI.